

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan letak geografis yang sangat strategis. Hal ini menjadikan posisi Indonesia rentan terhadap segala jenis ancaman yang bisa berdampak terhadap stabilitas nasional. Situasi dan ancaman yang semakin kompleks mendorong kebijakan pertahanan negara dibentuk guna kesiapan menghadapi ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan negara. Namun, jika ditilik dari luasnya wilayah Indonesia, maka jumlah maupun jenis Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) yang dimiliki oleh Indonesia masih belum cukup untuk melakukan pengamanan (Prasetyo, Armawi, dan Salim, 2017). Kondisi ini tentunya perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah, salah satunya dengan meningkatkan kemandirian industri pertahanan nasional sehingga mampu untuk melakukan produksi dan memiliki daya saing serta dapat menunjang perekonomian negara dan pada akhirnya dapat memperkuat pertahanan negara.

Pertahanan negara merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan wilayah. Pertahanan negara yang kuat didukung oleh alat peralatan pertahanan dan keamanan yang memadai, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun melalui pengadaan dari luar negeri. Adapun salah satu komponen yang digunakan untuk melihat kekuatan pertahanan negara, yaitu melalui anggaran pertahanan. Merujuk pada Yusgiantoro (2014), anggaran pertahanan biasanya dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam satu periode tertentu yang dinamakan rasio. Banyaknya barang yang diminta atau besarnya permintaan agregat (Y) dipengaruhi oleh konsumsi

masyarakat (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), ekspor (X), dan impor (M), secara matematis dapat dirumuskan:

$$Y = C + I + G + (X-M) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- C : *Consumption*
- I : *Investment*
- G : *Government Expenditure*
- X : *Export*
- M : *Import*

Secara pengertian PDB yang merupakan pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas *output* barang dan jasa pada satu periode tertentu. PDB ini dapat mencerminkan kinerja ekonomi. Semakin tinggi PDB suatu negara, maka semakin baik pula kinerja ekonomi di negara tersebut (Sapthu, 2013). Indikator PDB ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas pada kegiatan ekonomi di suatu negara (Yusgiantoro dalam Pandia et al, 2022).

Berdasarkan data SIPRI tahun 2023, rasio pengeluaran militer Indonesia dari PDB dapat dilihat konstan berada di bawah 1%. Apabila dibandingkan dengan keseluruhan negara *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), maka Indonesia memiliki rasio pengeluaran militer yang cukup rendah, apalagi untuk ukuran negara yang sangat luas. Hal ini bertolak belakang dengan beberapa negara tetangga Indonesia yang memiliki wilayah kecil seperti Singapura dan Brunei, yang pada tahun 2021 rasio pengeluaran militer keduanya mencapai angka 3% sementara Indonesia hanya 0,7%. Data rasio pengeluaran militer Indonesia dan negara ASEAN tersebut dapat dilihat lebih lengkap pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Belanja Pertahanan Negara-Negara ASEAN (Dalam % dari PDB)

No.	Tahun	Indonesia	Malaysia	Singapura	Brunei	Filipna	Vietnam	Thailand	Kamboja	Laos	Myanmar
1	2009	0,6	1,9	3,9	2,9	1,2	2,3	1,7	1,3	0,2	-
2	2010	0,6	1,5	3,4	2,9	1,2	2,3	1,5	1,5	0,2	-
3	2011	0,7	1,6	3,2	2,2	1,2	2,0	1,5	1,5	0,2	-
4	2012	0,7	1,4	3,1	2,2	1,1	2,2	1,4	1,5	0,2	3,9
5	2013	0,9	1,5	3,0	2,3	1,2	2,2	1,4	1,6	0,2	4,0
6	2014	0,8	1,4	3,0	3,1	1,0	2,3	1,4	1,7	-	3,8
7	2015	0,9	1,5	3,0	3,3	1,1	2,4	1,4	1,8	-	4,3
8	2016	0,8	1,4	3,1	3,5	1,0	2,4	1,4	1,9	-	4,1
9	2017	0,9	1,1	3,0	2,9	1,2	2,3	1,4	2,1	-	3,6
10	2018	0,7	1,0	2,8	2,6	0,8	2,3	1,4	2,2	-	2,3
11	2019	0,7	0,9	2,8	3,1	0,9	-	1,4	2,2	-	2,1
12	2020	0,9	1,0	2,9	4,1	1,0	-	1,5	2,4	-	3,0
13	2021	0,7	1,1	3,0	3,3	1,0	-	1,3	2,3	-	3,3
14	2022	0,7	0,9	2,7	2,4	1,0	-	1,2	2,1	-	3,1

Sumber: SIPRI, (2023).

Tabel 1.1 menunjukkan jika rasio pengeluaran militer dari PDB untuk belanja pertahanan Indonesia masih sangat rendah. Hal ini tentu akan berpengaruh pada target pencapaian kemandirian industri pertahanan Indonesia sekaligus pertahanan negara. PDB sendiri berkaitan erat dengan profit sebuah industri, termasuk dalam hal ini adalah profit dari perusahaan-perusahaan industri pertahanan. Kontribusi nyata dari industri pertahanan terhadap PDB yaitu berupa anggaran pertahanan yang disusun kemudian dialokasikan untuk melakukan impor Alpalhankam dan juga dialokasikan untuk melakukan produksi untuk di ekspor ke luar negeri. Aspek-aspek tersebut secara bersamaan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang angka bagi PDB (Saputro et al., 2021).

Yusgiantoro (2014), menyatakan bahwa penggunaan indikator pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan PDB didasarkan kepada beberapa argumen, yaitu:

1. PDB menghitung total produksi suatu negara dengan memakai faktor produksi yang berada di dalam negeri.
2. Peningkatan PDB mencerminkan peningkatan balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam berbagai kegiatan produksi karena PDB merupakan jumlah dari semua nilai tambah kegiatan produksi dalam perekonomian.
3. PDB dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi karena menggunakan konsep aliran (*flow concept*) dalam suatu negara karena memperhitungkan nilai produk yang dihasilkan pada periode sebelumnya.
4. Indikator PDB dapat digunakan untuk mengukur kinerja dari kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah suatu negara dalam rangka meningkatkan produktivitas pada kegiatan ekonomi di negara tersebut.

Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dari persentase perubahan PDB berdasarkan harga konstan (PDB nyata) yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDB(t) - PDB(t-1)}{PDB(t-1)} \times 100\% \quad \dots(2)$$

dimana:

PDB (t) : PDB riil harga tahun dasar pada tahun t

PDB (t-1) : PDB riil harga tahun dasar pada tahun sebelumnya

Salah satu penunjang PDB dapat dilihat dari capaian kinerja perusahaan-perusahaan industri pertahanan. Data capaian kinerja dari berbagai perusahaan industri pertahanan nasional sendiri mengalami fluktuasi dan sangat beragam. Sebagai referensi dapat dilihat dari perbandingan tiga perusahaan industri pertahanan pada periode tahun 2017 hingga 2019 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2

Ikhtisar Kinerja Keuangan Perusahaan Industri Pertahanan

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	PT Dahana (Persero)			
	Pendapatan Usaha	1.550.434	1.982.661	1.989.400
	Beban Pokok Usaha	1.251.960	1.669.229	1.727.434
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	125.257	133.964	74.098
	Total Asset	1.492.078	1.795.258	1.857.671
	Total Liabilitas	5.824	853.734	855.862
	Total Ekuitas	801.111	941.523	1.001.808
2	PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)			
	Pendapatan Usaha	1.308.680	847.756	395.377
	Beban Pokok Usaha	1.130.519	549.177	380.990
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	6.610	462	(434.765)

No.	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
	Total Asset	2.026.983	1.829.674	1.393.342
	Total Liabilitas	1.812.701	1.465.635	1.661.979
	Total Ekuitas	214.282	221.567	(268.637)
3	PT Pindad (Persero)			
	Pendapatan Usaha	2.456.125	3.200.897	3.398.782
	Beban Pokok Usaha	1.835.905	5.080.465	5.426.694
	Laba (Rugi) Tahun Berjalan	92.064	100.578	101.079
	Total Asset	5.961.534	6.453.286	6.889.791
	Total Liabilitas	4.657.364	2.405.534	2.564.734
	Total Ekuitas	1.304.169	1.372.820	1.465.333

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan PT Dahana (Persero), PT INTI (Persero), dan PT Pindad (Persero) dalam Nugraha, Djuwarsa, dan Mayasari, 2020.

Berdasarkan tabel tersebut PT Dahana dan PT Pindad menghasilkan laba secara berurutan masing-masing yaitu Rp. 74,1 milyar dan Rp. 101,1 milyar pada 2019 (Nugraha, Djuwarsa, dan Mayasari, 2020). Hal ini berbanding terbalik dengan PT INTI yang merugi sebesar Rp. 435 milyar di tahun yang sama. Padahal untuk menyumbang kepada PDB, sektor industri pertahanan Indonesia harus mampu menghasilkan profit setiap tahunnya secara mandiri.

Pada negara berkembang, upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pertahanan melalui industri pertahanan yang mandiri dan mampu berkontribusi terhadap perekonomian negara merupakan sebuah hal yang memerlukan serangkaian upaya komprehensif yang tidak mudah. Belum lagi hampir tidak ada teknologi persenjataan modern saat ini yang sepenuhnya berasal dari negara tertentu. Oleh sebab itu, menyadari adanya ketergantungan tersebut, maka suatu negara akan berupaya untuk meningkatkan berupa penguasaan teknologi terbaru untuk mampu mencapai kemandirian industri pertahanan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah melalui jalinan kerja sama dengan negara lain pada bidang industri pertahanan.

Boutin (2009) menyatakan bahwa kemandirian di sektor industri pertahanan merupakan hal yang sangat sulit untuk dicapai, termasuk oleh negara-negara maju sekalipun. Sementara menurut Everett, bagi negara-negara berkembang kesulitan yang dihadapi akan jauh lebih besar terutama terkait keterbatasan finansial, sumber daya manusia, bahan baku, teknologi, serta infrastruktur yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas penelitian dan pengembangan (Boutin, 2009). Argumen ini diperkuat oleh Bitzinger yang menyatakan bahwa mayoritas negara berkembang mengalami keterbatasan dalam kepemilikan sumber daya manusia terampil, ketersediaan infrastruktur, serta penelitian terapan dalam teknologi pertahanan sehingga pada akhirnya berimplikasi pada kurangnya kemampuan dalam desain, perekayasaan, dan produksi persenjataan (Kurç, 2016).

Pengembangan kemandirian industri pertahanan berkaitan erat dengan adanya fenomena globalisasi industri pertahanan yang telah menguat sejak tahun 1980-an dan telah menandai terjadinya tren yang signifikan dalam intensivitas kerja sama antar negara-negara di dunia dalam membangun industri pertahanannya (Caverley, 2007). Berkaitan dengan hal tersebut, maka negara-negara maju juga memilih untuk membangun industrinya melalui kerja sama dengan negara lain dibandingkan melakukannya secara mandiri karena akan mengurangi biaya produksi secara signifikan. Menurut Bitzinger, hal tersebut berkaitan dengan kebijakan penganggaran, peningkatan biaya penelitian dan pengembangan atau *Research and Development* (R&D), serta peningkatan daya saing di pasar industri pertahanan (Susdarwono, 2020). Sebagaimana dinyatakan oleh Kaldordan bahwa globalisasi industri pertahanan telah membawa pada perubahan dinamika pengadaan persenjataan dari yang sebelumnya menggunakan model pengadaan autarki (pengadaan yang bersifat independen) menjadi model interdependensi, yang kemudian disebut juga sebagai salah satu fenomena intensifnya kerja sama dan

kolaborasi dalam memproduksi persenjataan di era modern (Susdarwono, 2020).

Didasarkan pada keuntungan yang mungkin didapatkan tersebut, maka praktik kerja sama industri pertahanan semakin banyak dilakukan, baik itu oleh negara maju maupun berkembang (Kinne, 2018). Menurut Muradi, pentingnya penguasaan teknologi dalam menuju kemandirian membuat banyak negara selanjutnya menerapkan mekanisme *defense offset* dalam menjalin kerja samanya, yaitu sebuah proses pembelian atau investasi timbal balik yang disepakati oleh produsen teknologi dengan konsumen sebagai imbalan dari pembelian barang atau jasa Alpalhankam (Tampubolon dan Aritonang, 2022).

Pengembangan industri pertahanan menuju tahap kemandirian di Indonesia disinergikan dengan kebutuhan postur pertahanan negara. Berkaitan dengan itu, pemerintah telah membentuk strategi penguasaan teknologi pertahanan melalui kerja sama industri pertahanan dan pengadaan Alpalhankam guna meningkatkan kemampuan industri pertahanan nasional sehingga mampu mendatangkan manfaat dan dampak positif terhadap pertahanan negara, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Strategi Penguasaan Teknologi Pertahanan

Strategi	Penerapan	Tujuan
Partisipasi Industri Pertahanan: Penguasaan teknologi melalui implementasi Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan <i>Offset</i> (IDKLO) dalam pengadaan Alpalhankam di luar negeri.	IDKLO: Radar dan Peluru Kendali (Rudal).	1) Meningkatkan industri pertahanan profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan inovatif; 2) Meningkatkan kemandirian pemenuhan kebutuhan Alpalhankam;
Kerja Sama Luar Negeri: Penguasaan teknologi melalui kerja sama	1. <i>Joint Development:</i> Pesawat Tempur dan Tank Sedang;	

Strategi	Penerapan	Tujuan
dengan luar negeri dalam bentuk <i>joint development</i> , <i>joint production</i> atau <i>joint venture</i> .	2. <i>Joint Venture</i> : Propelan dan Mesiu; 3. <i>Joint Production</i> : Kapal Selam dan Perusak Kawal Rudal (PKR).	3) Meningkatkan kemampuan produksi dan jasa pemeliharaan.
Litbangyasa Nasional: penguasaan teknologi melalui program Litbangyasa oleh unsur-unsur lembaga, litbangyasa, pengguna dan industri alat utama yang dikordinasikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).	Konsorsium: Raket.	

Sumber: Ditjen Potan Kemenhan RI, (2022).

Dari Tabel 1.3 terlihat jika terdapat tiga strategi utama dalam penguasaan teknologi pertahanan yang diterapkan di Indonesia, yaitu melalui partisipasi pertahanan, menjalin kerja sama luar negeri, dan juga melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, serta rancang bangun dan perekayasaan nasional. Adapun implementasi kerja sama industri pertahanan yang dilakukan Indonesia dalam kerangka penguasaan teknologi dan meningkatkan kemandirian industri pertahanan, diantaranya adalah:

- 1) Kerja sama antara Indonesia dengan Belanda tahun 2014, berupa pembangunan Kapal *Frigate* atau Perusak Kawal Rudal (PKR). Secara teknis disepakati dengan pembuatan dua modul yang di bangun di Belanda yaitu modul kamar mesin dan *Combat Information Center (CIC)*, sedangkan empat modul lainnya dikerjakan di PT PAL. Kemudian pembuatan unit kedua, disepakati satu modul dibangun oleh Belanda yaitu modul CIC sedangkan 5 modul lainnya dirangkai di PT PAL. Proses pembangunan pada kerja sama ini merupakan bentuk alih

teknologi oleh Belanda kepada Indonesia (Direktorat Kersin, 2019).

- 2) Kerja sama Indonesia dengan Korea Selatan yang telah dimulai pada tahun 2012 melalui proyek pengembangan kapal selam DSME-209 *Submarine (Chanbogo Class)* yang meliputi alih teknologi dan juga *On the Job Training*. Skema pembangunan kapal selam tersebut dibagi ke dalam *Local Production/Joint Production*, dimana sebagian *section* akan di produksi di PT PAL, sistem senjata dan sistem pendorong akan diproduksi di *Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME)*, serta perakitan akhir kembali dilakukan di PT PAL (Meidiani, 2018).
- 3) Masih dengan Korea Selatan, kerja sama pengembangan pesawat tempur KFX/IFX antara PT DI dan *Korea Aerospace Industries (KAI)* ini dibagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap TD (*Technical Development*), EMD (*Engineering and Manufacturing Development*), dan tahap PD (*Production Development*). Adapun periode pada setiap tahapan pengembangan mempunyai rentang yang berbeda, yakni dua tahun untuk TD yang dimulai pada 2011-2012, delapan tahun untuk EMD yang dijalankan pada rentang tahun 2013-2021, dan tahapan PD akan dilaksanakan mulai tahun 2021 dan seterusnya (Afiff, 2016).
- 4) Kontrak pembelian enam pesawat tempur *Dassault Rafale*, kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Dassault Aviation dan Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan RI. Implementasinya berupa skema Program *Offset* dan *Transfer of Technology (ToT)* antara Dassault dan PT Dirgantara Indonesia.

Berkenaan dengan kebijakan industri pertahanan di Indonesia, sebenarnya terdapat badan khusus yang membidangi kebijakan industri

pertahanan Indonesia, yaitu Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). KKIP diharapkan mewujudkan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing, yang pada akhirnya akan bermuara pada terwujudnya kemandirian pemenuhan Alpalhankam yang sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh TNI, Polri dan Kementerian/Lembaga lainnya. KKIP berperan sebagai komite yang mewakili pemerintah dalam mengoordinasikan kebijakan nasional dimulai dari merencanakan, merumuskan, melaksanakan, mengendalikan, mensinkronisasikan, hingga mengevaluasi industri pertahanan nasional. Peranan KKIP ini dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP serta Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Industri Pertahanan. Kelembagaan KKIP juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan yang menjelaskan mengenai definisi, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup industri pertahanan. Dinyatakan di dalam UU tersebut bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan produksi industri pertahanan agar bekerja secara sinergis sehingga pada akhirnya industri pertahanan dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal.

Akan tetapi, peranan KKIP dalam membangun industri pertahanan nasional yang mandiri harus menghadapi berbagai kendala. Pada Rapim Kemhan TNI dan Polri 2020 disebutkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pengembangan industri pertahanan terutama berkaitan dengan belum terintegrasinya kegiatan R&D, masih rendahnya pemanfaatan Komponen Imbal Dagang, Kandungan Lokal dan Ofset (IDKLO) dalam pengadaan Alutsista dari luar negeri, belum adanya atau terbentuknya lembaga yang ditujukan untuk menjamin kerahasiaan teknologi, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana, belum optimalnya peran pemerintah, serta adanya keterbatasan dalam ketersediaan anggaran (KKIP, 2020). Kendala-kendala ini berpotensi dalam

melemahkan pengembangan industri pertahanan, termasuk ketika melakukan kerja sama luar negeri.

Mengacu pada berbagai kendala yang dihadapi di atas, maka keterbatasan anggaran merupakan salah satu kendala yang paling utama. Anggaran pertahanan atau dikenal juga sebagai anggaran militer merupakan sumber daya keuangan yang dialokasikan dan digunakan untuk meningkatkan pertahanan negara. Anggaran sering kali mencerminkan seberapa kuat pertahanan dihadapkan pada suatu ancaman yang timbul. Selain itu, anggaran juga memberi gambaran mengenai berapa banyak belanja militer yang harus dikeluarkan untuk tahun berikutnya. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), secara total pengeluaran militer dunia mencapai 2,24 triliun US\$ pada tahun 2022 dengan kata lain terdapat kenaikan sebesar 3,7% secara tahunan (*year-on-year/yoy*). Jumlah ini adalah jumlah terbesar yang pernah tercatat di SIPRI. Sementara, Indonesia menempati peringkat ke-27 dunia. Tercatat, anggaran militer RI pada tahun lalu sebesar US\$9 miliar atau naik 1,3% secara tahunan. Sebagai perbandingan, berikut (Tabel 1.4) adalah besaran anggaran militer Indonesia dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Tabel 1.4
Anggaran Militer Negara-Negara Asia Tenggara 2022

No.	Negara	Anggaran Militer
1	Indonesia	US\$ 9,300,000,000/Rp 138,1 T
2	Vietnam	US\$ 6,237,600,000/Rp 94 T
3	Thailand	US\$ 2,933,000,000/Rp 43,6 T
4	Myanmar	US\$ 2,285,000,000/Rp 34 T
5	Malaysia	US\$ 3,792,000,000/Rp 56,3 T
6	Philippina	US\$ 4,340,000,000/Rp 64,5 T
7	Singapura	US\$ 11,560,000,000/Rp 171,6 T
8	Kamboja	US\$ 632,000,000/Rp 9,4 T
9	Laos	US\$ 38,280,000/Rp 569 M

Sumber: *Global Fire Power*, (2022).

Meskipun anggaran yang dialokasikan cukup besar (sebagaimana terlihat pada Tabel 1.4), namun pada postur anggaran terdapat alokasi dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan angkatan bersenjata baik untuk pengadaan, pemeliharaan, pendanaan personil, serta untuk merawat serta memperbaiki Alpalhankam. Dengan kata lain, dari postur anggaran yang ada terbagi-bagi ke dalam alokasi berbeda. Oleh sebab itu, negara membutuhkan kemampuan pengelolaan keuangan nasional yang memadai. Terdapat tiga unsur yang menentukan di dalam kekuatan finansial tersebut, yaitu anggaran pertahanan (*defense budget*), cadangan devisa dan emas (*reserve of foreign exchange and gold*), dan daya beli/pembayaran (*purchasing power*). Tabel 1.5 berikut menunjukkan perbandingan anggaran pertahanan dan kekuatan finansial negara-negara Asia Tenggara Tahun 2022.

Tabel 1.5
Perbandingan Anggaran Pertahanan dan Kekuatan Finansial Negara-Negara Asia Tenggara

Negara	Peringkat Dunia	Keuangan (Dalam US\$)			
		Anggaran Pertahanan	Cadangan Devisa	Daya Beli	Utang Luar Negeri
Indonesia	15	9.300.000.000	130.200.000.000	3.130.470.000.000	393.252.000.000
Malaysia	48	3.792.819.200	102.400.000.000	855.600.000.000	224.596.000.000
Thailand	29	2.933.064.054	202.600.000.000	1.200.200.000.000	167.890.000.000
Singapura	42	11.560.000.000	279.800.000.000	531.900.000.000	1.557.646.000.000
Philippina	51	4.390.000.000	81.570.000.000	871.560.000.000	81.995.000.000
Vietnam	28	6.237.000.000	49.500.000.000	800.000.000.000	96.580.000.000

Sumber: *Global Fire Power*, (2022).

Faktor yang paling perlu diperhatikan adalah cadangan devisa dan belanja pertahanan. Dari dua unsur tersebut, terlihat bahwa Singapura lebih unggul dengan memiliki cadangan devisa maupun belanja pertahanan paling besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa Singapura memiliki peluang lebih besar untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi situasi ancaman. Sedangkan Indonesia memiliki kemampuan pembelian paling

besar. Hal tersebut menggambarkan bahwa dari sisi finansial, Indonesia memiliki peluang yang paling besar untuk mentransformasikan aset-aset ekonominya dalam membiayai dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman. Kendati demikian, kemampuan pembelian membutuhkan waktu dan mekanisme politik yang tidak semudah melakukan pembiayaan seperti pada cadangan devisa dan belanja pertahanan. Berdasarkan pernyataan tersebut, anggaran pertahanan yang meningkat pada alokasinya masih mengedepankan pembelian daripada secara penuh memberdayakan industri pertahanan dalam negeri. Adapun kerja sama yang dilakukan guna memberikan kontribusi terhadap cadangan devisa dan belanja pertahanan belum signifikan memberikan dampak bagi kemandirian sehingga tentunya juga berdampak pada upaya mendukung PDB dan pertahanan negara.

Kendati belum ada penelitian spesifik yang mengkaji ataupun mengukur keterkaitan kemandirian industri pertahanan dengan PDB, namun ketidakmandirian sektor industri pertahanan tentunya akan memperkecil kemungkinan peningkatan pendapatan negara melalui ekspor Alpalhankam. Beberapa kajian yang menelaah pengaruh kemandirian industri pertahanan yang menegaskan bahwa kondisi industri pertahanan yang tidak mandiri dan bergantung pada pasokan Alpalhankam dari negara lain akan beresiko terhadap politik luar negeri dan intervensi asing dalam persoalan domestik negara, contohnya embargo yang dilakukan Amerika Serikat pada 1990-an dan intervensi Australia dalam kasus separatism Timor Timur (Laksmaha, 2012). Sementara Sebastian dan Gindarsah (2013) menyatakan bahwa ketergantungan Alpalhankam dari luar negeri telah menyulitkan kesiapan Indonesia dalam lintas pengoperasian dan menimbulkan munculnya peningkatan beban pemeliharaan. Artinya, berbagai ketidakmandirian industri pertahanan ini sangat berpotensi dalam melemahkan kesiapan negara menghadapi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara.

Berdasarkan data SIPRI (Béraud-sudreau et al., 2022), Indonesia masih sangat bergantung pada suplai peralatan Alpalhankam dari luar negeri dengan nilai impor yang mencapai hingga 90% dari akuisisi senjatanya. Hal ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-17 sebagai negara importir senjata terbesar di dunia selama periode tahun 2016-2020. Dengan kata lain, kemajuan dan kemandirian industri pertahanan Indonesia masih belum terlihat optimal karena produksi dalam negeri hanya menyumbang sekitar 10% dari total pengadaan. Angka 10% tersebut menunjukkan bahwa kontribusi industri pertahanan Indonesia belum maksimal mendukung PDB, sehingga hal ini tentunya dapat berpengaruh kepada pertahanan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penelitian ini ditujukan untuk mengkaji bagaimana pengaruh kerja sama dan kemandirian industri pertahanan dalam mendukung PDB sebagai upaya nyata membangun pertahanan negara. Melalui penelitian ini diharapkan dapat ditemukan model yang dapat mengoptimalkan kerja sama dan kemandirian industri pertahanan dalam mendukung PDB sebagai upaya pertahanan negara.

1.2 Identifikasi Masalah

Kerja sama industri pertahanan bagi Indonesia penting untuk ditingkatkan serta dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan mengingat di dalamnya terkandung skema kerja sama disertai alih teknologi dan pengetahuan yang berperan penting meningkatkan kemandirian dan PDB. Namun pada kenyataannya kerja sama industri pertahanan yang telah dilakukan selama ini tampaknya belum optimal dikarenakan Indonesia masih bergantung pada Alpalhankam dari luar negeri. Artinya, sektor industri pertahanan Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan Alpalhankam dalam negeri disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti adanya keterbatasan infrastruktur, keterbatasan teknologi untuk produksi, keterbatasan anggaran, kepastian pasar dalam negeri, dan sebagainya.

Ketergantungan terhadap impor Alpalhankam ini tentunya dapat berimbas pada besarnya kontribusi yang dapat diberikan terhadap PDB sekaligus melemahkan pertahanan negara Indonesia di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, berikut merupakan identifikasi masalah dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Kerja sama industri pertahanan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB).
2. Kemandirian industri pertahanan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB).
3. Kerja sama dan kemandirian industri pertahanan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB).
4. Kerja sama industri pertahanan mempengaruhi pertahanan negara.
5. Kemandirian industri pertahanan mempengaruhi pertahanan negara.
6. PDB mempengaruhi pertahanan negara.
7. Kerja sama dan kemandirian industri pertahanan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertahanan negara.

Didasarkan pada temuan hasil uji yang akan didapatkan, maka dapat terlihat hal- hal apa saja yang perlu mendapatkan penekanan melalui kajian manajemen pertahanan melalui kerja sama industri pertahanan, kemandirian, dan PDB sebagai upaya untuk memperkuat pertahanan negara Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Banyak hal yang dapat mempengaruhi kemandirian industri pertahanan, beberapa diantaranya yaitu:

1. Penguasaan teknologi. Penguasaan teknologi ini sangat penting karena tidak hanya berpengaruh pada kemampuan produksi Alpalhankam, tetapi juga keefektifan pengelolaan industri pertahanan secara keseluruhan (Bellais, 2013).
2. Daya saing, mengacu pada berbagai keunggulan kompetitif yang harus dimiliki oleh industri pertahanan negara untuk dapat berkompetisi dengan kompetitor sejenis (Gansler, 2011).
3. Kemampuan modal, yakni pendanaan atas berbagai kegiatan produksi serta kegiatan riset dan pengembangan.
4. Sumber daya manusia, merupakan *man power* dalam melaksanakan tugas dan kegiatan industri pertahanan.
5. Infrastruktur teknologi serta riset dan pengembangan yang sangat mendasar pengaruhnya terhadap industri pertahanan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian tersebut dapat dijumpai, salah satunya melalui kerja sama. Oleh sebab itu, kajian di dalam penelitian ini akan dibatasi dan dikhususkan pada kerja sama industri pertahanan. Melalui pembatasan ini diharapkan dapat diketahui ada tidaknya pengaruh kerja sama industri pertahanan terhadap kemandirian industri pertahanan yang mampu berkontribusi terhadap PDB sehingga dapat memperkuat pertahanan negara. Penelitian ini juga menggunakan terminologi Alpalhankam bukan Alutsista, karena di dalam PDB tidak hanya Alutsista yang berkontribusi tetapi keseluruhan Alpalhankam yang berhasil diproduksi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dioperasionalkan ke dalam bentuk pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Adakah pengaruh kerja sama industri pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)?
2. Adakah pengaruh kemandirian industri pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)?
3. Adakah pengaruh kerja sama dan kemandirian industri pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)?
4. Adakah pengaruh kerja sama industri pertahanan terhadap pertahanan negara?
5. Adakah pengaruh kemandirian industri pertahanan terhadap pertahanan negara?
6. Adakah pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap pertahanan negara?
7. Bagaimana kerja sama dan kemandirian industri pertahanan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) dan pertahanan negara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kerja sama industri pertahanan terhadap PDB.
2. Menganalisis pengaruh kemandirian industri pertahanan terhadap PDB.
3. Menganalisis pengaruh kerja sama dan kemandirian industri pertahanan terhadap PDB.
4. Menganalisis pengaruh kerja sama industri pertahanan terhadap pertahanan negara.
5. Menganalisis pengaruh kemandirian industri pertahanan terhadap pertahanan negara.
6. Menganalisis pengaruh PDB terhadap pertahanan negara.

7. Menemukan dan membangun model kerja sama dan kemandirian industri pertahanan membangun PDB guna pertahanan negara.

1.6 Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat penelitian yang diharapkan, baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya wawasan dan literatur dalam studi manajemen pertahanan, khususnya tentang kerja sama industri pertahanan guna meningkatkan kemandirian industri pertahanan dan kontribusinya terhadap perekonomian negara dalam hal ini PDB sehingga mampu memperkuat pertahanan negara.

1.6.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh alternatif tahapan kebijakan yang efektif yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah terutama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemenhan RI) serta para pemangku kepentingan lainnya untuk melakukan rumusan kerja sama industri pertahanan yang mampu meningkatkan kemandirian industri pertahanan Indonesia dan dapat berkontribusi terhadap PDB sehingga mampu memperkuat pertahanan negara. Selain itu, dapat juga digunakan sebagai kajian praktis bagi pengambilan perumusan dan pengambilan keputusan oleh parlemen, yakni Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam hal pembahasan terkait anggaran pertahanan dengan pemerintah.